

2025

Policy Brief



Kepatuhan Kebijakan dan Konsistensi Implementasi Aturan Kemitraan Lokal bagi UMKM di Kota Makassar

**BADAN RISET DAN INOVASI KOTA MAKASSAR
UNIVERSITAS FAJAR**

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Makassar, dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, meskipun peranannya sangat penting, kinerja UMKM di wilayah ini masih terkendala oleh ketidakkonsistenan dalam implementasi kebijakan dan kurangnya hubungan yang kuat berbasis kepercayaan antara UMKM dan pemerintah. Kebijakan ringkas ini membahas peran krusial kepatuhan kebijakan, konsistensi implementasi kebijakan, dan kualitas relasional dalam meningkatkan kinerja UMKM di Makassar. Kebijakan ini juga menyoroti pentingnya kemampuan pemasaran sebagai faktor moderasi dalam memanfaatkan hubungan institusional ini untuk hasil yang lebih baik.



Temuan Utama

Kepatuhan Kebijakan dan Kualitas Relasional

Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah merupakan pendorong utama kualitas relasional antara UMKM dan pemerintah. Kepatuhan kebijakan, yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan seperti perizinan, perpajakan, dan standar operasional, memperkuat hubungan kepercayaan dan saling pengertian. Hubungan positif ini tidak hanya memastikan interaksi yang lebih lancar antara pemerintah dan UMKM, tetapi juga meningkatkan kolaborasi

Konsistensi Implementasi Kebijakan

Kebijakan implementasi konsisten juga terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas relasional. Ketika kebijakan dilaksanakan secara konsisten, UMKM merasa lebih percaya diri terhadap komitmen pemerintah dalam mendukung mereka. Konsistensi ini mengurangi ketidakpastian dan membantu membangun kepercayaan, menciptakan lingkungan yang stabil yang mendorong UMKM untuk lebih aktif berinvestasi dalam bisnis dan berpartisipasi dalam program-program pemerintah

Temuan Utama

➔ Kualitas Relasional sebagai Pendorong Kinerja UMKM

Kualitas relasional yang kuat antara UMKM dan pemerintah terbukti secara signifikan meningkatkan kinerja UMKM. Kualitas relasional—yang ditandai dengan kepercayaan, komitmen, dan koordinasi—memfasilitasi akses pasar yang lebih baik, dukungan operasional, dan pengembangan kapasitas. Ketika UMKM memiliki hubungan yang positif dengan lembaga pemerintah, mereka lebih cenderung menunjukkan kinerja yang baik dalam hal pertumbuhan penjualan, perluasan pasar, dan keberlanjutan.

➔ Kemampuan Pemasaran sebagai Faktor Moderasi

Kemampuan pemasaran diidentifikasi sebagai faktor moderasi yang penting dalam hubungan antara kualitas relasional dan kinerja UMKM. UMKM dengan kemampuan pemasaran yang kuat lebih mampu memanfaatkan keuntungan hubungan yang diberikan oleh dukungan pemerintah, seperti akses pasar dan peluang jaringan



Rekomendasi Kebijakan

1

Penyederhanaan Proses Perizinan dan Regulasi untuk UMKM

1. Membentuk tim khusus untuk meninjau dan menyederhanakan prosedur perizinan usaha yang ada di Makassar, dengan fokus pada UMKM.
2. Menyediakan platform digital terpadu untuk pengajuan izin usaha, yang memungkinkan UMKM untuk mengakses semua informasi terkait izin dan peraturan melalui satu kanal online.
3. Mengadakan sosialisasi regulasi secara rutin kepada UMKM agar mereka lebih memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku dan cara pemenuhan kewajiban administrasi secara efisien

2

Peningkatan Konsistensi Implementasi Kebijakan Pemerintah

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan untuk memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten di seluruh sektor dan instansi pemerintah.
2. Membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan yang jelas untuk evaluasi konsistensi implementasi kebijakan pada level kota, dan memberi ruang bagi UMKM untuk memberikan umpan balik terkait implementasi kebijakan.
3. Menyusun buku panduan/kumpulan kebijakan yang terperinci dan mudah diakses oleh UMKM untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai aturan yang berlaku.

Rekomendasi Kebijakan

3. Perkuat Kualitas Relasional antara Pemerintah dan UMKM

1. Mengadakan forum dialog bulanan antara pemerintah dan asosiasi UMKM, untuk mendiskusikan isu-isu kebijakan, hambatan yang dihadapi UMKM, serta peluang kolaborasi dalam program-program pemerintah.
2. Membentuk grup kerja khusus yang melibatkan perwakilan pemerintah dan UMKM untuk merancang program peningkatan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional.
3. Menyediakan program mentoring dan pendampingan untuk UMKM, yang berfokus pada pengembangan kapasitas manajerial dan operasional mereka melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan profesional di bidang bisnis.

4. Investasi dalam Peningkatan Kemampuan Pemasaran UMKM

1. Menyelenggarakan pelatihan pemasaran digital bagi UMKM, yang mencakup penggunaan media sosial, e-commerce, dan alat pemasaran online lainnya untuk memperluas jangkauan pasar mereka.
2. Menyediakan subsidi untuk platform digital bagi UMKM yang ingin memulai atau meningkatkan kehadirannya di dunia digital, seperti pembuatan website, akun e-commerce, dan promosi online.
3. Mendorong UMKM untuk bergabung dalam program inkubasi bisnis yang memberikan akses ke bimbingan pemasaran dan peluang pemasaran bersama dengan bisnis lain dalam ekosistem UMKM.



Rekomendasi Kebijakan

5. Meningkatkan Akses ke Pembiayaan dan Modal Kerja

1. Memperkenalkan program pembiayaan berbasis kemitraan, yang memungkinkan UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan syarat yang lebih mudah melalui kerjasama dengan bank-bank lokal atau lembaga keuangan mikro.
2. Menyediakan pelatihan manajemen keuangan bagi UMKM untuk membantu mereka mengelola keuangan bisnis secara lebih efisien dan memahami bagaimana mengakses pembiayaan yang ada.
3. Membentuk platform digital untuk akses modal usaha, yang menghubungkan UMKM dengan investor atau lembaga keuangan untuk mempercepat proses pengajuan pembiayaan

6. Mengoptimalkan Peran Pemerintah dalam Mendorong Jaringan Pasar dan Kolaborasi

1. Membuat program pemasaran bersama bagi UMKM dengan melibatkan pemerintah sebagai fasilitator, dengan tujuan untuk mempromosikan produk lokal melalui event atau pameran yang didukung oleh pemerintah.
2. Menyelenggarakan expo produk UMKM tahunan di Makassar yang melibatkan sektor pemerintah, sektor swasta, dan pelaku UMKM untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM di pasar domestik dan internasional.
3. Menyusun peta jaringan pasar yang jelas dan mudah diakses oleh UMKM untuk menunjukkan sektor-sektor yang membutuhkan produk mereka dan memberikan informasi tentang permintaan pasar.

Penutup

Implementasi rekomendasi kebijakan ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah-langkah tersebut dapat segera dilaksanakan melalui kerjasama antar instansi pemerintah, asosiasi UMKM, dan sektor swasta. Dengan fokus pada penyederhanaan regulasi, peningkatan kapasitas pemasaran, dan penguatan hubungan relasional, Makassar dapat menjadi contoh terbaik dalam mendukung UMKM untuk mencapai potensi penuh mereka.